

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, salah satu perspektif yang menjadi dasar pemikiran untuk mempelajari isu-isu dunia yakni Realisme. Realis fokus pada isu *high politics* yang merupakan isu paling banyak dihadapi oleh negara. Contoh isu *high politics* tersebut seperti perang atau konflik bersenjata. Di akhir tahun 2010 hingga awal 2011, terjadi beberapa konflik di regional Afrika Utara dan Timur Tengah yang cukup menyita perhatian.

Konflik bermula dari gerakan orang-orang yang menginginkan revolusi atas pemerintahan di negara mereka yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Tujuan mereka sama, yaitu untuk menumbangkan rezim yang sedang berkuasa.¹Gejolak politik ini dikenal dengan istilah ‘Musim Semi Arab’ (*The Arab Spring*).²Negara-negara yang mengalami konflik tersebut seperti Tunisia, kemudian diikuti oleh Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan sekarang di Suriah.³

¹ Roby Rakhmadi, “Kepentingan Amerika Serikat Dalam Intervensi Militer NATO ke Libya 2011” (Skripsi S1 Universitas Indonesia, 2012), hal 1

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjD-bmN-oHVAhVFr48KHW1oCCEQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F20317796-S-pdf-Roby%2520Rakhmadi.pdf&usg=AFQjCNEZN6fLfyIX4n4kV-SvwBseuS4iNg>

²Amnesty International, *The ‘Arab Spring’ : Five Years On*<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/> (Diakses pada 27 Februari 2017)

³ Roby Rakhmadi, hal 1

Pada Maret 2011, belasan pelajar Suriah menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota.⁴ Menanggapi tindakan yang dilakukan para pelajar itu, polisi Suriah menangkap dan memenjarakan mereka, sehingga memicu timbulnya aksi protes untuk pembebasan anak-anak tersebut. Aksi protes yang terjadi, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak empat orang karena penembakan yang dilakukan pihak keamanan Pemerintah Suriah.⁵

Untuk meredam protes, Presiden Suriah, Bashar Al Assad mengirimkan delegasi yang diperintahkan untuk menemui keluarga anak-anak yang ditangkap itu, serta berjanji mengadili aparat keamanan yang bertindak brutal.⁶ Namun, upaya persuasif yang dilakukan pemerintah tidak mendapatkan respon positif, sehingga pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menghadapi para demonstran yang membuat semakin banyaknya korban.⁷ Aksi protes kemudian berubah menjadi demonstrasi massal yang meluas dari kota Deera menuju kota-kota di pinggiran Latakia, Banyas, Homs, Ar Rasta dan Hamma di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur.⁸

Berkembangnya Konflik Suriah sejak 2011 menjadi isu internasional didasari oleh adanya seruan dari berbagai organisasi internasional seperti Amnesty Internasional dan para aktivis kemanusiaan. Komisaris urusan HAM PBB, Navi

⁴ A. Muchaddam Fahham & A.M Kartaatmaja, "Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya", *Politica Vol V no.1* (Juni 2015) hal 37, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332/266> mengutip Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah : Membongkar Persekongkolan Multinasional* (Depok : IMA n, 2013) hal 100

⁵ Siti Muti'ah, "Pergolakan Panjang Suriah : Masih adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme" hal 5, *Jurnal CMES Pusat Studi Timur Tengah Universitas Sebelas Maret Surakarta Vol V no. 1* (Juli-Desember 2012) <https://cmesuns.files.wordpress.com/2013/04/cmest-vol-5-no-1-edisi-jul-des-2012.pdf>

⁶ Sulistio Hermawan, "Konflik di Suriah pada masa Bashar Al Assad Tahun 2011 – 2015", *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta* (2011) hal 114, mengutip Triyas Kuncahyono, *Musim semi di Suriah, Anak-anak Penyulut Revolusi* (Jakarta : Kompas, 2012), hal 97

⁷ Sulistio Hermawan, hal 114

⁸ Siti Muti'ah, hal 5

Pillay menyerukan agar masyarakat internasional bertindak untuk melindungi penduduk sipil Suriah dari konflik berdarah yang dapat membawa Suriah ke dalam perang saudara.⁹Rasa simpati juga ikut disuarakan oleh berbagai negara seperti AS, Liga Arab, Uni Eropa, dan Turki.

Turki merupakan salah satu negara di regional Timur Tengah yang bertetangga dengan Suriah. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Turki menduduki posisi sulit antara konflik regional di Balkan dan Timur Tengah, contohnya adalah dengan Armenia di 1992, Yunani di 1996, dan Suriah di tahun 1998.¹⁰ Relasi Turki - Rusia juga tidak stabil akibat konflik dan tensi politik. Dengan kata lain, hubungan Turki dengan negara tetangganya cenderung konfrontatif, seringkali terjadi kesalahpahaman, dan tingginya tingkat ancaman.¹¹

Namun pada akhir abad 20, Turki menjadi pemain yang sangat aktif dan penting di kawasan Timur Tengah semenjak pemerintahan Turki didominasi oleh *Adelet ve Kalkinma Partisi (AKP)* dari tahun 2002. Dibawah rezim AKP, Turki membangun kedekatan dengan Suriah, Iran, Iraq, lalu memulai eksistensinya dalam *Organization of The Islamic Conference (OIC)*, menghadiri konferensi-

⁹ Dyan Kostermans, “PBB : Perang Saudara bisa terjadi di Suriah”, DW.com, postingan 2 Desember 2011, <http://www.dw.com/id/pbb-perang-saudara-bisa-terjadi-di-suriah/a-15573186> (Diakses pada 15 Maret 2017)

¹⁰Joshua W. Walker, “Turkey’s Global Strategy : Introduction ; The Sources of Turkish Grand Strategy ; ‘Strategic Dept’ and ‘Zero Problems’ in Context”, Laporan London School of Economics and Political Science (LSE) Research Online 2011, hal 1 <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/SR007.aspx>

¹¹ Ibid.,

konfrensi Liga Arab, dan berkontribusi pada pasukan PBB di Lebanon. Turki juga turut memediasi konflik antara Suriah dengan Israel.¹²

Perkembangan eksistensi Turki tersebut diarahkan oleh salah satu strategi luar negeri baru Turki, *'Zero Problems with Neighbours Strategy'* yang berlandaskan geopolitik, liberalisme, mengutamakan *soft power*, dan aspirasi untuk mendapatkan keuntungan bersama dalam hubungan dengan tetangganya.¹⁴ Arah kebijakan luar negeri Turki di bawah AKP menggambarkan bahwa Turki adalah aktor independen yang kepentingannya tidak dikendalikan oleh siapapun. Selain itu, Turki juga menjunjung nilai – nilai demokrasi.¹⁵

Dengan kemunculan *Arab Spring*, Turki mejadi salah satu negara tetangga Suriah yang terkena dampak dari Konflik Suriah. Dampak Konflik Suriah terhadap Turki dalam bidang sosial misalnya, adalah terkait imigrasi masyarakat Suriah ke Turki guna mencari perlindungan, karena Turki merupakan negara terdekat Suriah yang dapat ditempuh dengan menggunakan jalur darat bagi para pengungsi. Gubernur Propinsi Kilis, Turki, yang berbatasan dengan Suriah, mengatakan 35.000 pengungsi sudah mencapai wilayah perbatasan.¹⁶

Pada bidang politik dan keamanan Konflik Suriah membuat terpicunya organisasi ISIS, dan organisasi kelompok separatist Kurdi di Turki yang sejak lama

¹² Omer Taspinar, "Turkey's Strategic Vision and Syria", Center for Strategic and International Studies, *The Washington Quarterly* (2012), hal 127 <https://www.brookings.edu/articles/turkeys-strategic-vision-and-syria/>

¹⁴ Simonas Dapkus, "Turkey's Security Dilemma on the Border With Syria : Situation Assessment and Perspectives of the Intervention", hal 51 http://lfpr.lt/wp-content/uploads/2016/01/LFPR_2015_33_Dapkus.pdf

¹⁵ Omer Taspinar, hal 130

¹⁶ Situs BBC Online, "Jumlah Pengungsi Suriah yang Coba Masuk Turki Berlipat Ganda", postingan 7 Februari 2016, http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160206_dunia_suriah_pengungsi (Diakses pada 29 Desember 2016)

menginginkan pendirian negara sendiri.¹⁷Konflik Suriah yang terjadi tidak hanya melibatkan kedua belah pihak bertikai, yaitu pemerintah dengan masyarakat oposisi, namun juga mengundang keikutsertaan dari negara besar seperti Rusia. Keterlibatan Rusia dalam upaya intervensi di Suriah misalnya, telah membuat dilanggarnya wilayah udara Turki oleh pesawat tempur Rusia yang akan pergi ke Suriah, yang direspon dengan ditembak jatuhnya pesawat tersebut oleh Turki.¹⁹Peristiwa pesawat tempur ini mengakibatkan hubungan Turki dan Rusia menjadi terganggu.²⁰

Dalam pencegahan perluasan Konflik Suriah, Turki sudah melakukan upaya persuasif pada tingkat bilateral antara pemimpin negara.²¹Langkah yang ditempuh yaitu dengan menyarankan diadakannya reformasi.²²Tapi Basahr Al Assad tidak menepati janji untuk melakukan reformasi, hal ini berujung pada tuntutan Turki meminta Presiden Suriah, Bashar Al Assad agar turun dari jabatannya.²³



¹⁷ ISIS merupakan bagian dari organisasi Al Qaeda di Irak tahun 2003, yang membuat nama alias sebagai *Islamic State of Iraq* (ISI) pada tahun 2006. Kemudian ketika Konflik Suriah terjadi, ISI mendeklarasikan nama barunya sebagai *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Sedangkan Kurdi adalah nama suatu suku yang tersebar di beberapa negara Timur Tengah seperti Iran, Irak, dan Turki. Wilayah tempat tinggal Suku Kurdi dibagi oleh PBB pasca Perang Dunia I. Sebagian suku ini memiliki obsesi untuk menyatukan diri dalam suatu negara berdaulat, yang terbentuk dalam organisasi PKK (Partiya Karkaren Kurdistan)

¹⁹ Situs BBC Online, “Turkey Downing of Russian Warplane – what we know”, postingan 1 Desember 2015 <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-34912581> (Diakses pada 24 Januari 2017)

²⁰ Denny Armandhanu, “Putin marah besar pesawat tempurnya ditembak jatuh Turki”, CNN Indonesia postingan 25 November 2015 <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151125074856-134-93849/putin-marah-besar-pesawat-tempurnya-ditembak-jatuh-turki/> (Diakses pada 15 Maret 2017)

²¹ Christopher Philips. “Into the Quagmire : Turkey’s Frustrated Syria Policy”, Chatnam House Briefing Middle East and North Africa Programme - Paper 2012 hal 6

²² Omer Taspinar , hal 137

²³ Simonas Dapkus, hal 52

Pada bulan Maret 2012, Turki menutup kedutaannya di Damaskus, Ibukota Suriah, namun konsulat Turki di Aleppo tetap dibuka.²⁴ Selain itu, Turki menunjukkan dukungannya kepada kelompok oposisi Suriah dengan kesediaan Turki menjadi tuan rumah beberapa pertemuan kelompok oposisi Suriah dan acara “*The 2nd Summit of Friends of Syrian People*” di Istanbul, April 2012.²⁵ Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu juga menuntut reformasi dalam sistem PBB karena dianggap tidak mampu mencegah kejahatan serius yang dilakukan rezim Suriah.²⁶

Beberapa ahli berpendapat, tindakan Turki pada Konflik Suriah tidak akan terlalu jauh. Seperti yang disampaikan Noomane Raboudi, *a professor of Arab Islamic Studies, University of Ottawa*, berasumsi, Turki menginginkan peran besar dalam Konflik Suriah, tapi mungkin tidak dengan intervensi militer.²⁷ Selain itu, Reva Bhalla, *vice president of global analysis for Texas-based consultancy, Stratfor*, juga mengatakan bahwa tindakan Turki akan mempengaruhi upaya perdamaian dengan PKK dan memicu Kurdistan di utara Suriah.²⁸

Intervensi menurut Lauterpacht dalam Huala Adolf, adalah turut campurnya suatu negara dalam sebuah urusan dalam negeri negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan yang bertujuan untuk memelihara

²⁴ Andy Budiawan dan Dyan Kostermans “Turki tutup Kedutaan di Damaskus” , DW.com, <http://www.dw.com/id/turki-tutup-kedutaan-di-damaskus/a-15838288>, postingan 26 Maret 2012 (Diakses pada 9 Februari 2017)

²⁵ Omer Taspinar , hal 137

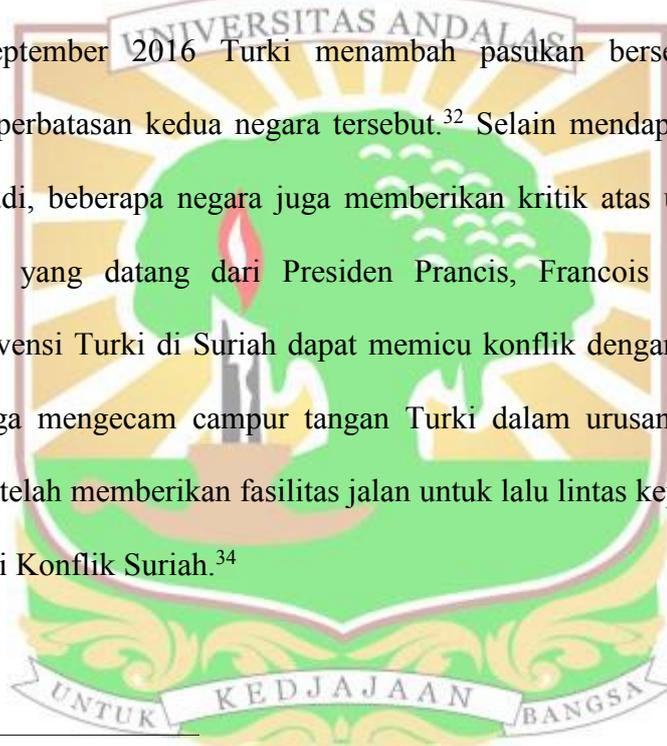
²⁶ Rudi Hendrik, “PM Turki Serukan Reformasi Sistem di PBB”, Situs Mirajnews postingan 13 Januari 2013 <http://mirajnews.com/2015/01/pm-turki-serukan-reformasi-sistem-di-pbb.html> mengutip pidato Ahmet Davutoglu di Yayasan Koerber, lembaga cendekiawan yang berbasis di Berlin, Senin (12/1) dalam *Anadolu Agency* (Diakses pada 9 Februari 2017)

²⁷ Andre Mayer, “5 reasons Turkey unlikely to go to war with Syria”, postingan 16 Mei 2015 <http://www.cbc.ca/news/world/5-reasons-turkey-is-unlikely-to-go-to-war-with-syria-1.1313205> (Diakses pada 23 Juni 2017)

²⁸ Ibid.,

atau mengubah keadaan situasi negara tersebut.²⁹Intervensi dapat juga dimaksudkan untuk membantu mengatasi suatu konflik baik konflik nasional maupun konflik internasional.³⁰

Pada kenyataanya, Turki tetap melakukan intervensi pada Konflik Suriah. Contoh intervensi Turki di Konflik Suriah, terjadi di 55 kilometer barat daya kota Jabarlus.³¹ Setelah menguasai kota strategis Jabarlus dari kelompok teroris ISIS pada 25 Agustus 2016, didukung pasukan Oposisi Suriah, pada tanggal 3 September 2016 Turki menambah pasukan bersenjata dan alat militernya di perbatasan kedua negara tersebut.³² Selain mendapatkan dukungan dari Arab Saudi, beberapa negara juga memberikan kritik atas upaya intervensi Turki, seperti yang datang dari Presiden Prancis, Francois Hollande, yang khawatir intervensi Turki di Suriah dapat memicu konflik dengan Rusia.³³ Sekjen Liga Arab juga mengecam campur tangan Turki dalam urusan Suriah, karena Turki dituduh telah memberikan fasilitas jalan untuk lalu lintas kepada para teroris yang terlibat di Konflik Suriah.³⁴



²⁹ Vicky Fabiansyah, “Dukungan Amerika Serikat kepada Oposisi dalam Konflik Melawan Basshar Al Assad di Suriah (2011)”, Artikel UIN Syarif Hidayatullah 2015, hal 7

³⁰ Ibrahim Noor, “Analisis Intervensi Rusia dalam Konflik Suriah”, E-journal Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Mulawarman, hal 1066

³¹ Situs BBC Online, “Turki kirim Tank tambahan ke Suriah untuk Menggempur ISIS” http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160904_dunia_turki_serangan_baru_postingan_4_September_2016 (Diakses pada 9 Februari 2017)

³² Situs Tempo Online, “Melawan ISIS, Turki kirim ratusan Tank ke Suriah”, postingan 4 September 2016, <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/09/04/115801472/melawan-isis-turki-kirim-lusinan-tank-ke-suriah> (Diakses pada 9 Februari 2017)

³³ Rita Uli Hutapea, “Intervensi Turki di Suriah bisa picu perang Turki – Rusia”, mengutip apa yang dilansir Kantor berita AFP dari radio France Inter, 20 Februari 2016. Postingan 20 Februari 2016 <http://news.detik.com/internasional/3146907/hollande-intervensi-turki-di-suriah-bisa-picu-perang-turki-rusia> (Diakses pada 3 Februari 2017)

³⁴ Situs Arrahmahnews, “Liga Arab Kutuk Intervensi Turki di Suriah”, postingan 30 November 2016, <https://arrahmahnews.com/2016/11/30/liga-arab-kutuk-intervensi-turki-di-suriah/> (Diakses pada 9 Februari 2017)

1.2 Rumusan Masalah

Turki memiliki strategi luar negeri *'Zero Problems with Neighbours'* yang berarti bahwa Turki selalu berupaya menjaga hubungan baiknya dengan negara tetangga di kawasan. Akan tetapi cita-cita tersebut menghadapi rintangan ketika *Arab Spring* muncul dan Turki terkena dampak konflik dari salah satu negara yang mengalami fenomena tersebut, yaitu Suriah. Turki mengalami perubahan perilaku dalam berhubungan dengan Suriah akibat konflik yang terjadi. Dimulai dengan intervensi diplomatik Turki untuk menengahi konflik, hingga menjadi terlibat langsung dengan melakukan intervensi militer di Konflik Suriah meski Turki mendapat kritik dari beberapa pihak terkait keputusan tersebut. Dengan kata lain, posisi Turki pada konflik Suriah menyebabkan Turki bertindak bertentangan dengan *'Zero Problems with Neighbours Strategy'*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai :

“Mengapa Turki melakukan kebijakan intervensi di Konflik Suriah ?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan intervensi Turki di Konflik Suriah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam :

1. Aspek Teoritis : sebagai bahan referensi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya, dan peneliti ilmu sosial politik pada umumnya terkait dengan penggunaan model *State Behaviour* dalam mengkaji pertimbangan kebijakan sebuah negara.
2. Aspek Praktis : sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan pembelajaran dari permasalahan yang terjadi.

1.6 Studi Pustaka

Dalam penulisan penelitian, peneliti memiliki beberapa referensi kepustakaan yang dapat menjadi penguat dasar pemikiran peneliti. Studi pustaka yang pertama dari Christopher Philips dengan judul *Into the Quagmire : Turkey's Frustrated Syria Policy*.³⁵ Tulisan ini memuat dinamika hubungan antara Turki dengan Suriah dan perubahan kebijakan yang dilakukan Turki seiring dengan perubahan hubungan tersebut. Tulisan dari Christopher peneliti rasa cukup akurat karena penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dan berwenang.

Di awal tulisan, disebutkan bahwa setelah kerjasama dan kedekatan sekian lama antara Turki dengan Suriah, Turki kemudian merubah kebijakannya secara radikal sebagai bentuk respon dari Konflik Suriah. Turki sudah melakukan dialog dengan Rusia, Iran, Mesir, dan Arab Saudi untuk menyelesaikan krisis Suriah.

³⁵ Christopher Philips, "Into the Quagmire : Turkey's Frustrated Syria Policy". Chatham House Briefing Middle East and North Africa Programme - Paper 2012 <https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/188137#>

Tindakan yang mungkin akan dilakukan di masa yang akan datang seperti proses multilateral yang dibutuhkan untuk mendorong stabilitas Suriah dan mencegah *collapsenya* negara apabila rezim Assad suatu saat dapat dijatuhkan.

Disintegritas Suriah, dapat memicu gerakan-gerakan separatis Kurdi di perbatasan Turki-Suriah dan bisa menyebabkan dipertanyakannya integritas teritorial Turki. Pada bidang ekonomi, isu ini juga telah menyebabkan krisis terhadap pasar utama Turki di Irak Utara. Ditambah lagi dengan isu baru mengenai krisis pengungsi Suriah yang semakin menyebabkan masyarakat sipilnya teraniaya dan hidup dengan kurang memadai.

Tulisan dari Christopher ini membahas hubungan Turki dan Suriah dengan cukup detail dan ringkas, sehingga peneliti mendapatkan banyak pengetahuan baru dari tulisan tersebut, yang berguna sebagai pedoman untuk membuat pembahasan di bab selanjutnya.

Studi pustaka yang *kedua* ditulis oleh Omer Taspinar berjudul *Turkey's Strategic Vision and Syria*.³⁶ Penulis mengatakan, hampir selama abad kedua puluh, Turki memilih untuk tidak terlalu ikut campur terhadap persoalan-persoalan di Timur Tengah. Namun, di akhir dekade, terjadi perubahan dari Tradisi Kemalis (*Kemalist Tradition*) yang didasari dari ideologi pendiri Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Turki kemudian menjadi pemain yang sangat aktif dan berperan penting di kawasan Timur Tengah.

³⁶Omer Taspinar, "Turkey's Strategic Vision and Syria". Center for Strategic and International Studies, *The Washington Quarterly* (2012) <https://www.brookings.edu/articles/turkeys-strategic-vision-and-syria/>. Penulis merupakan Profesor pada National War College dan non-Resident Senior Fellow di Brookings Institution.

Di bawah pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan (*Justice and Development Party, 'AKP'*) sejak 2002, Turki mulai dekat dengan Suriah, Iran, dan Iraq, memiliki kepemimpinan dalam *Organization of The Islamic Conference (OIC)*, menghadiri konferensi-konferensi Liga Arab, dan berkontribusi dalam pasukan PBB di Lebanon. Turki juga ikut serta untuk mediasi konflik antara Suriah – Israel. Hubungan diplomatik Turki dengan Iran dan Hamas, sangat berbeda terhadap hubungannya dengan Amerika Serikat dan Israel. Hal ini memicu rasa ingin tahu apakah Turki telah merubah orientasinya atau tindakan tersebut hanya sekedar taktik dalam memperkuat relasi Turki.

Tulisan di atas memberikan gambaran kepada peneliti tentang visi-visi strategis Turki terhadap hubungannya dengan negara-negara Timur tengah dan negara-negara kawasan lain. Tulisan ini menjadi penting karena, dapat membuat perbandingan kebijakan-kebijakan ideologis Turki pada hubungan luar negerinya. Peneliti dapat memperoleh informasi mengenai kepentingan-kepentingan Turki yang mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi di perpolitikan internasional, khususnya terhadap Suriah.

Studi pustaka yang *ketiga* ditulis oleh Simonas Dapkus, dengan judul *Turkey's Security Dilemma on the Border With Syria : Situation Assessment and Perspectives of the Intervention*.³⁷ Dapkus menulis tentang dilema yang dialami Turki di perbatasannya dengan Suriah. Dilema ini terkait keberadaan kelompok

³⁷ Simonas Dapkus, "Turkey's Security Dilemma on the Border With Syria : Situation Assessment and Perspectives of the Intervention". http://lfpr.lt/wp-content/uploads/2016/01/LFPR_2015_33_Dapkus.pdf. Penulis adalah Mahasiswa Magister dalam program Diplomasi dan Hubungan Internasional di Institut Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Universitas Vilnius.

yang teroris ISIS, juga keberadaan gerakan separatis PKK (*Partya Karkeren Kurdistane, / Eng ; 'Kurdistan's Workers Party*).

Pada tulisan ini dijelaskan tentang kemungkinan intervensi yang dapat dilakukan oleh Turki terhadap Konflik Suriah karena konflik ini telah mengusik kepentingan Turki dalam menangani kelompok separatis PKK di perbatasan. Situasi yang tidak menentu di perbatasan akan mengakibatkan mudahnya kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok teroris untuk beraksi dan membahayakan kedaulatan negara Turki. Kemungkinan intervensi yang terjadi dilihat dari segi hukum internasional dan kapabilitas militer Turki itu sendiri. Simonas Dapkus juga berusaha untuk melihat keterkaitan pemerintahan Turki yang didominasi oleh Partai AKP, terkait pandangan kebijakan luar negeri Turki dalam mengahadai isu Konflik Suriah. Tulisan ini membantu peneliti untuk menjelaskan kondisi sosial-politik domestik Turki pada isu gerakan separatis yang juga dipengaruhi oleh Konflik Suriah yang terjadi.

Tulisan *keempat* yang peneliti gunakan berasal dari Joshua W. Walker yang berjudul *Introduction : The Sources of Turkish Grand Strategy – 'Strategic Depth' and 'Zero-Problems' in Context*.³⁸ Setelah berlalunya masa - masa darurat pasca Perang Dunia II dan keterbatasan akibat Perang Dingin, pada saat ini, Turki seolah ingin membangkitkan kembali kerajaan Ottoman, agar menjadi terdepan di kawasan Barat dan di Timur, serta bertahan diantara pengaruh modernitas Barat dan keislaman Timur. Tulisan ini memuat tentang arah kebijakan luar negeri Turki

³⁸ Joshua W. Walker, "Introduction : The Sources of Turkish Grand Strategy – 'Strategic Depth' and 'Zero-Problems' in Context", ditulis tahun 2011 pada Laporan London School of Economics and Political Science (LSE) Research Online, Mei 2012, <http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/SR007.aspx>

pasca Perang Dunia yang cenderung fokus pada *'Zero Problems with Neighbours'* atau dapat dikatakan, Turki yang 'tidak memiliki masalah dengan tetangga', serta *'Strategic Depth'* yang merupakan reposisi Turki dari negara pheri-pheri dalam sistem internasional menjadi aktor utama yang berperan dalam berbagai agenda dengan berbagai kawasan. Kebijakan tersebut, mengutamakan peningkatan hubungan kerjasama secara bilateral dan kawasan. Maka dari itu, untuk mencapai optimalisasi perannya di kawasan dan di level global, Turki memprioritaskan 'dialog dan kerjasama' dari pada 'kekerasan dan konfrontasi' yang mana hal ini tentu akan membangun kedekatan dengan tetangga dalam urusan ekonomi dan sosial. Perkembangan orientasi Turki dalam level domestik, sejarah dan internasional ini diprakasai oleh Menteri Luar Negeri Turki, Ahmed Davutoglu.

Studi Pustaka kelima ditulis oleh Eduard Soler I Kecha, berjudul *The Ceneptual Architecture of Turkish Foreign Policy : An update in light of regional turbulence*.³⁹Eduard mengatakan, sejak terjadinya perubahan politik dan ketidakstabilan di Timur Tengah, konsep kebijakan luar negeri Turki yang dipopulerkan oleh Ahmed Davutoglu seperti *Strategic Depth*, *Rhythmic Diplomacy*, dan *Multidimentional Foreign Policy*, dihadapkan pada tantangan. Begitupula dengan strategi *Zero Problems with Neighbours* yang tentu tidak lagi harmonis jika disandingkan dengan situasi yang dihadapi Turki di lapangan. Dalam pidato Recep Tayyip Erdogan pada 2011, disebutkan bahwa kebijakan luar negeri Turki akan disesuaikan dengan perubahan lingkungan regional dan Turki

³⁹ Eduard Soler I Kecha, "The Conceptual Architecture of Turkish Foreign Policy : An Update in Light of Regional Turbulence", Barcelona Center for International Affairs Research Fellow Document 2011

akan mendukung perjuangan untuk demokrasi di Afrika dan Timur Tengah.⁴⁰ Di tahun yang sama Ahmed Davutoglu juga mengatakan, transisi politik di negara-negara Arab adalah hal yang tak dapat terelakkan, dan tindakan terbaik yaitu dengan memahami penyebab terjadinya transformasi serta mengembangkan strategi yang cocok untuk menanganinya.

Selain ketidakstabilan di Timur Tengah, Turki juga dihadapi dengan transformasi di lingkup global terkait dengan krisis di Uni Eropa dan konflik domestik Turki dengan Kurdi. Di satu sisi, kondisi ini membuat Turki yang sebelumnya berada pada *status quo* power, menjadi lebih tegas dan bersifat *interventionist actor*.⁴¹ Di sisi lain Turki juga membuka kemungkinan kebijakan luar negeri yang lebih pragmatis, dimana Turki bisa saja bersikap idealis pada visinya terhadap regional melalui retorika, namun pragmatism dan *realpolitik* mungkin saja dapat digunakan dalam menghadapi krisis di Timur Tengah.⁴²

Perbedaan penelitian yang akan peneliti tulis dibandingkan dengan studi pustaka yang telah dijabarkan di atas adalah studi pustaka pertama dan kedua hanya membahas kebijakan Turki terhadap Suriah secara umum, namun tidak melakukan kajian teoritis Ilmu Hubungan Internasional. Sedangkan studi pustaka ketiga memiliki keterkaitan yang cukup dekat dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, namun studi pustaka ketiga melihat persoalan dari konsep *security dilemma*. Studi pustaka yang keempat dan kelima membahas strategi luar negeri Turki dengan pemahaman kebijakan, akan tetapi memiliki perbedaan judul dengan penelitian ini.

⁴⁰ Eduard Soler I Kecha, mengutip Susan Gusten, *Mandate for a new Turkish era*

⁴¹ Eduard Soler I Kecha, mengutip Philip Robins, *Suits and Uniforms*

⁴² Eduard Soler I Kecha, mengutip Saban Kardas

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pembentukan alur berpikir dalam penulisan sebuah penelitian. Kerangka konseptual dapat menjadi acuan untuk mengkaitkan variabel-variabel, menganalisis, dan menyimpulkan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Perilaku Negara dari Paul R. Viotti dengan Mark V. Kauppi dan konsep Intervensi yang dilihat dari perspektif Realisme.

Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, sejumlah keputusan dan aksi yang dilakukan oleh negara terkait hubungannya dengan aktor-aktor lain di luar negara, baik negara lain, perusahaan-perusahaan multinasional, organisasi internasional, maupun aktor non negara disebut dengan kebijakan luar negeri.⁴⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi membagi beberapa faktor pertimbangan sebuah negara dalam membuat kebijakan luar negeri yang diformulasikan sebagai *State Behaviour* (Perilaku Negara).

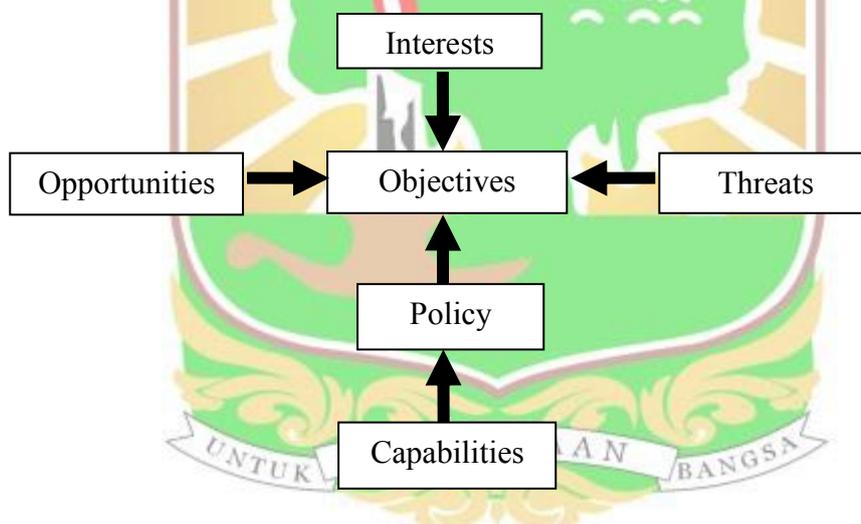
1.7.1 *State Behaviour* (Perilaku Negara)

Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, meskipun globalisasi telah mengangkat peran aktor internasional *nonstate*, lembaga swadaya masyarakat, individu dan kelompok kepentingan, negara masih menjadi pemain kunci dan tetap merupakan aktor penting dalam hubungan internasional atau perpolitikan dunia. Para pemimpin negara mengejar dan memahami tujuan yang konsisten dengan kepentingan-kepentingan nasional mereka. Misalnya kepentingan dasar atau kepentingan mutlak negara adalah terlindunginya integritas fisik, dan tujuan yang lebih spesifik adalah untuk mempertahankan terhadap kemungkinan ancaman invansi negara tetangga.

⁴⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory*, Edisi keempat (New York : Pearson Education Inc, 2010) hal 458

Dalam sistem global, jika peluang ditangani dengan tepat, maka dapat membantu untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula, ancaman yang berasal dari negara-negara lain yang harus dihadapi, khususnya jika mereka mengganggu pencapaian tujuan nasional. Untuk memanfaatkan peluang dan untuk menangani ancaman ini, pemimpin menyusun kebijakan khusus dengan memberdayakan berbagai elemen kemampuan nasional. Mereka memobilisasi kemampuan nasional untuk mengerahkan kekuatan untuk mencapai tujuan dan melindungi kepentingan mereka. Kepentingan, peluang, ancaman, kemampuan dan tujuan negara tersebut tergambar pada bagan *State Behaviour* berikut⁴⁵ :

Gambar 1
Understanding State Behaviour Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi



1. *Interest* (Kepentingan)

Dalam menjabarkan faktor kepentingan nasional, Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi menyebut asumsi Hans Morgenthau dalam bukunya “*Politic Among Nations*”, bahwa, *‘Whatever the ultimate aims of international politics, power is*

⁴⁵ Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi, *International Relations and World Politics*, Edisi kelima (USA : Pearson, 2012) hal 187

always the immediate aim”. Apapun tujuan para pembuat keputusan untuk mencapai kepentingan negara, *power* atau kekuatan adalah hal yang mutlak.

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi membagi kepentingan menjadi :

a). *Survival* (Bertahan Hidup)

Pertama, tidak ada pembuat kebijakan yang tidak sepakat bahwa kelangsungan hidup nasional merupakan sebuah tujuan negara, yang mana hal ini sering disebut sebagai inti atau kepentingan vital umum untuk semua negara. Kelangsungan hidup sama dengan status kedaulatan sebuah negara. Kedaulatan adalah hak untuk mengklaim bagi suatu negara dalam menerapkan kelengkapan kekuatan yurisdiksi, otoritas internal, atau kewenangan negara untuk bertindak secara independen di dalam negerinya maupun dipelaksanaan politik luar negerinya.

b). *Economic Vitality* (Vitalitas Ekonomi)

Kepentingan dasar yang kedua untuk negara adalah vitalitas ekonomi dan kemakmuran. Kemakmuran ekonomi tidak hanya dicari untuk masyarakat, tetapi kemakmuran ekonomi juga bisa menjadi kekuatan penting bagi negara pada urusan internasional.

c). *Core Values* (Nilai Inti)

Kepentingan selanjutnya yakni pelestarian nilai-nilai inti dari masyarakat. Di banyak negara Barat, misalnya, nilai-nilai demokrasi merupakan elemen kunci dari identitas nasional, begitu juga dengan hak asasi manusia, mereka tercermin dalam struktur dan fungsi dari sistem politik.

2. *Threats*(Ancaman)

Untuk mencapai suatu tujuan nasional negara dihadapkan dengan ancaman. Ancaman yang diperoleh oleh suatu negara dipengaruhi oleh tindakan aktor lain. Jika sebuah negara memiliki potensi untuk merugikan tetapi tidak memiliki kemampuan, maka ancaman yang diterima negara lain rendah. Demikian pula, jika sebuah negara mungkin memiliki kemampuan, tetapi jika hanya ada sedikit atau tidak ada niat untuk menyerang, maka ancaman juga rendah.

3. *Opportunities* (Peluang)

Sistem global tidak hanya memberikan ancaman kepada kepentingan nasional, tetapi juga memberikan peluang yang dapat mempengaruhi formulasi tujuan kebijakan luar negeri. Bagaimanapun, sesuatu yang dipikirkan oleh pemerintah sebuah negara sebagai peluang, dapat dianggap sebagai ancaman oleh negara lain.

4. *Capability* (Kemampuan)

Kapabilitas atau kemampuan suatu negara merupakan hal-hal pendukung yang membuat negara dapat menjalankan tujuan dan kepentingan nasionalnya. Efisiensi pemberdayaan kapabilitas atau kemampuan negara ini akan mempengaruhi besar kecilnya peluang dan ancaman yang bisa didapatkan. Kapabilitas ini digolongkan menjadi kapabilitas politik, kapabilitas sosio-kultural, dan kapabilitas geografi-ekonomi, kapabilitas militer.

5. *Objectives* (Tujuan)

Kepentingan adalah panduan umum yang digunakan para pembuat kebijakan sebagai pedoman, namun tentu terdapat tujuan-tujuan yang lebih

spesifik dari kepentingan yang ada. Ruang lingkup tujuan negara dapat mencakup berbagai isu; politik, sosial, dan ekonomi.

6. *Policy* (Kebijakan)

Kebijakan adalah tindakan negara untuk menanggapi suatu keadaan. Kebijakan yang dikeluarkan merupakan hasil dari pertimbangan negara pada unsur kepentingan, ancaman, kapabilitas, dan peluang yang ada sehingga tujuan dari kebijakan sebuah negara dapat terlihat.

1.7.2 Intervensi

Secara umum, terdapat beberapa pengertian istilah intervensi. Intervensi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).⁴⁶ Intervensi menurut Lauterpacht dalam Huala Adolf, adalah turut campurnya suatu negara dalam sebuah urusan dalam negeri negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan yang bertujuan untuk memelihara atau mengubah keadaan situasi negara tersebut.⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro berpendapat dalam hukum internasional intervensi tidak memiliki arti luas ; sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan suatu negara, melainkan berartian sempit ; yaitu campur tangan negara asing yang bersifat menekan dengan alat kekerasan (*force*) atau dengan ancaman melakukan kekerasan apabila keinginannya tidak terpenuhi.⁴⁸

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia online, <http://kbbi.web.id/intervensi>

⁴⁷ Vicky Fabiansyah, hal 7

⁴⁸ Andrew Firdaus Sunarso Putra, "Intervensi terhadap Kedaulatan Suatu Negara Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus tentang : Perang Korea tahun 1950 – 1953)", Skripsi Universitas Jendral Soedirman, hal 47

Dari pengertian tersebut, istilah intervensi dapat dimaknai dalam arti luas yaitu sebagai segala bentuk campur tangan pihak ketiga dengan urusan internal pihak lain, maupun dalam arti sempit yang dimaksud oleh hukum internasional.

Intervensi dapat dikategorikan berdasarkan pihak yang terlibat, bentuk, dan tujuan. Pihak yang terlibat intervensi dapat berupa negara atau organisasi seperti PBB, *Non Governmental Organization (NGO)*, maupun organisasi lainnya⁴⁹ Intervensi diplomatik adalah intervensi tanpa kekerasan, tanpa pemaksaan, dan bersifat tidak mengikat yang semata adalah kesukarelaan dari pihak ketiga untuk membantu pihak bersengketa dalam mencapai kesepakatan perdamaian.⁵¹ Intervensi diplomatik dapat dilakukan dengan mediasi. Becovict dan Wille mengartikan mediasi sebagai sebuah proses manajemen konflik dimana pihak yang bersengketa meminta bantuan atau menerima tawaran bantuan dari individu/kelompok/negara/organisasi untuk menyelesaikan konflik mereka tanpa menggunakan kekuatan fisik.⁵²

Sedangkan intervensi militer yaitu penggunaan senjata militer atau penggunaan tindak kekerasan pada suatu negara oleh satu negara maupun beberapa negara yang dirancang untuk merubah kebijakan pemerintah, bahkan mengganti pemerintahan.⁵³ Martin Ortega memberikan contoh perkembangan intervensi

⁴⁹ Ibrahim Noor, hal 1068

⁵¹ Mathieu Couttenier dan Raphael Souberyan, "Diplomatic Intervention in Civil War : Trade for All or Trade for One?", hal 2 <http://www.lameta.univ-montp1.fr/Documents/DR2011-08.pdf>

⁵² Ibid.,

⁵³ Martin Ortega, "Military Intervention and European Union", hal 2 <http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp045e.pdf>

militer sebelum tahun 1990 sampai pasca Perang Dingin, berdasarkan tujuannya beberapa diantaranya yaitu:⁵⁴

a). *Imperialistic Pattern / Hegemonic Intervention*

Campur tangan militer sebuah negara di negara lain untuk mengambil keuntungan baik demi peningkatan pengaruh di negara lain tersebut, atau di lingkup internasional, agar perkembangan politik yang dianggap merugikannya dapat dibendung.

b). *Self Defense*

Penggunaan militer ke negara tetangga untuk merespon serangan bersenjata dari yang tak terkendali pemerintahannya, pada prinsipnya intervensi ini tidak untuk menggulingkan pemerintahan namun demi menangkal serangan.

c). *Humanitarian Intervention*

Satu negara atau sekelompok negara menggunakan angkatan bersenjata untuk meringankan penderitaan manusia di wilayah lain.

Pada Piagam PBB Bab I Pasal 2 (tentang prinsip) poin 4 disebutkan bahwa setiap negara anggota harus menahan diri dari ancaman dan penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau independensi politik suatu negara atau dengan cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.⁵⁵ Dalam Deklarasi majelis umum PBB tahun 1965 *Inadmissibility of Intervention in Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty* jugadisebutkan bahwa

⁵⁴ Ibid.,

⁵⁵ UN Purposes and Principles : Chapter I, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

tidak ada negara yang berhak melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan alasan apapun dalam urusan internal atau eksternal negara lainnya. Deklarasi ini mengancam intervensi bersenjata dan segala bentuk campur tangan atau upaya yang mengancam elemen politik, ekonomi, dan budaya suatu negara (Pasal 1). Penegasan tentang larangan negara-negara untuk ikut campur dalam perselisihan sipil di negara lain juga dimuat pada Pasal 3.⁵⁶

Larangan intervensi ini dikarenakan intervensi identik dengan pelanggaran kedaulatan sebuah negara. Piagam PBB Bab I Pasal 2 (tentang prinsip) poin 1 menyatakan bahwa keanggotaan PBB adalah berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan.⁵⁷ Kedaulatan merupakan terjemahan dari kata *sovereignty* (Inggris), *souverinete* (Prancis), atau *sovranus* (Italia).⁵⁸ Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi sebuah negara yang mengandung dua hal penting, yaitu *pertama*, kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut, *kedua*, kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain dimulai.⁶⁰ Kedaulatan dapat didefinisikan sebagai status hukum internasional suatu negara dalam wilayah yuridiksinya, yang tidak tunduk kepada yuridiksi pemerintah, eksekutif, legislatif, atau yudikatif dari negara asing atau hukum asing selain hukum publik internasional.⁶¹

⁵⁶ UN Documents Gathering a body of global agreements, "Inadmissibility of Intervention in Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty", <http://www.un-documents.net/a20r2131.htm>

⁵⁷ UN Purposes and Principles : Chapter I, <http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

⁵⁸ Andrew Firdaus Sunarso Putra, hal 18

⁶⁰ Andrew Firdaus Sunarso Putra, hal 20 mengutip Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I*

⁶¹ H Steinberger, "Sovereignty", Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, <http://nationalunitygovernment.org/pdf/Sovereignty-Guidelines-Alessandro-Pelizzon.pdf>

Berikut adalah keterkaitan isu penelitian dengan penjabaran Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi tentang hal-hal yang dapat mempengaruhi sebuah kebijakan :

Turki merupakan sebuah negara yang memiliki kepentingan pada Konflik Suriah. Kepentingan Turki untuk bertahan hidup, kepentingan ekonomi, dan kepentingan dalam penyebaran nilai-nilai Turki, dapat dicontohkan dari dampak konflik Suriah yang terjadi terhadap keamanan kedaulatan teritorial dan gangguan perekonomian Turki akibat konflik Suriah, selain itu Turki juga merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dikarenakan adanya kepentingan pada Konflik Suriah, Turki melakukan kebijakan intervensi. Selain itu, kebijakan intervensi yang diambil haruslah didukung oleh kemampuan Turki untuk melaksanakannya dan juga berdasarkan perhitungan peluang dan ancaman yang akan dihadapi Turki kemudian. Kepentingan nasional, ancaman, peluang dan kapabilitas yang dimiliki Turki dalam melakukan kebijakan intervensi, kelak akan menggambarkan tujuan-tujuan spesifik Turki pada Konflik Suriah. Oleh sebab itu, penggunaan konsep Intervensi serta *State Behaviour* dari Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi ini, dirasa cukup layak digunakan untuk menjelaskan mengenai analisis kebijakan intervensi Turki pada Konflik Suriah.

1.8 Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif - eksplanatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi literatur/dokumentasi.⁶² Sedangkan penelitian

⁶²Agus Subagyo, "Tinjauan Umum Ilmu Hubungan Internasional", slide 20
<http://docplayer.info/34623660-Tinjauan-umum-ilmu-hubungan-internasional-dosen-dr-agus-subagyo-s-ip-m-si.html>

ekplanatif yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan ide dengan memahami sebab dan akibat.⁶³

1.8.1 Batasan Penelitian

Pembatasan penelitian bertujuan agar isi penelitian lebih fokus pada hal yang akan dikaji. Meskipun pada bagian pembahasan juga akan dimuat beberapa latar belakang sejarah sebelum isu inti dari penelitian terjadi, namun secara umum penelitian ini dibatasi dari periode tahun 2011, yaitu awal berkembangnya konflik Suriah hingga pada tahun 2016 yaitu masa dimana terdapat kesepakatan gencatan senjata dari DK PBB tentang Konflik Suriah.

1.8.2 Unit Analisis, Unit Eksplanasi, dan Tingkat Analisis

Unit analisis yaitu unit yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan (karena itu juga bisa disebut ‘variabel dependen’) dan unit eksplanasi, yaitu unit yang dampaknya terhadap unit analisa hendak kita amati (bisa juga disebut ‘variabel independen’).⁶⁴ Dari penjelasan di atas, maka unit analisis penelitian ini adalah Turki, dan unit eksplanasinya adalah konflik Suriah, sedangkan tingkat analisa penelitian ini berada pada level negara bangsa.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau data-data tentang pengetahuan yang sedang dipelajari. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data, yakni melalui jurnal, dokumen, buku-buku, *website* dan sumber berita terkait.

⁶³ Devin Kowalzik, “Explanatory Research”, <http://study.com/academy/lesson/purposes-of-research-exploratory-descriptive-explanatory.html>

⁶⁴ Mochtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi” (Jakarta : LP3ES, 1990) hal 39

Dengan teknik yang berupa pengumpulan data secara berurut, yaitu misalnya data-data yang memberikan gambaran mengenai kejadian kronologis dari sebuah konflik atau pola hubungan antara suatu aktor dengan aktor lain dari suatu waktu hingga waktu tertentu. Berdasarkan jenisnya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan *secondary resource*.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang ada, pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap, yaitu yang pertama, peneliti akan mengumpulkan data kronologis berkembangnya Konflik Suriah serta dampak dari Konflik Suriah terhadap negara Turki. Selanjutnya pada tahap kedua, peneliti menjabarkan intervensi apa saja yang dilakukan Turki untuk meredakan konflik yang terjadi. Kemudian, pada tahap ketiga, peneliti mengelaborasi apa yang telah disampaikan di bagian kerangka konseptual yaitu menggunakan konsep Perilaku Negara dari Paul R.Viotti dan Mark V.Kauppi dan konsep Intervensi, dengan fakta-fakta dari data yang telah ditemukan, atau bisa disebut tahap untuk mencari keterkaitan antara unit eksplanasi dan unit analisis. Pada tahap ini peneliti akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi Turki dalam melakukan kebijakan intervensi, sehingga pada akhirnya ditarik kesimpulan dari tiga tahap sebelumnya untuk membentuk suatu pengetahuan baru guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

1.9 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian sehingga kelak dapat menjadi bahan bacaan yang baik dan sinkron, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini, dimuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, hingga metodologi yang digunakan.

Bab II KONFLIK SURIAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP TURKI

Pada Bab II dibahas mengenai awal mula fenomena *Arab Spring* yang memicu Konflik Suriah, terjadinya internasionalisasi Konflik Suriah, pihak-pihak yang terlibat Konflik Suriah, hingga dampak yang didapatkan Turki dari konflik yang terjadi.

Bab III KEBIJAKAN INTERVENSI TURKI PADA KONFLIK SURIAH

Terdapat pemaparan tentang gambaran umum perubahan strategi luar negeri Turki dan pembagian bentuk intervensi yang dilakukan Turki, yaitu secara diplomatik dan militer.

Bab IV ANALISIS KEBIJAKAN INTERVENSI TURKI PADA KONFLIK SURIAH 2011 – 2016

Bab ini menjadi bagian analisa yang mengaitkan antara isu penelitian yaitu kebijakan intervensi Turki pada konflik Suriah dengan kerangka konseptual *State Behaviour* dari R.Viotti dan Mark V.Kauppi dan konsep Intervensi.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban penelitian dan saran dari peneliti.

